



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Dokumentasi independen atas tindak pidana keterlibatan ekonomi dalam usaha dan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar

Dakwaan JPU

Pada tanggal 20 Desember 2016, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus partisipasi ekonomi dalam usaha dan dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar yang melibatkan terdakwa EP dan MH melawan Negara, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2012 Wakil Kementerian Kesehatan menyampaikan permohonan kepada Perdana Menteri, Xanana Gusmão untuk mengesahkan dana darurat bagi Kementerian Kesehatan sebesar US\$ 1,300.000. Uang tersebut digunakan untuk membeli kamar tidur listrik di VIP bagian cuci darah dan membeli kamar tidur manual sebanyak 80 buah lebih untuk dipasang di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares (HNGV). Permohonan tersebut diajukan dengan alasan karena dalam kusulitan dan menghadapi masalah kurangnya kamar tidur bagi pasien.

JPU mendakwa terdakwa Menteri Kesehatan MH mengajukan lagi sebuah permohonan kepada PM Xanana Gusmão untuk dilakukannya penunjukan langsung terhadap proyek pembelian kamar tidur dari sebuah perusahaan yang dimiliki oleh suami terdakwa EP yang berdomisili di Australia.

Sementara itu, untuk terdakwa EP, JPU mendakwa bahwa pada tahun 2012, setelah PM Xanana menyetujui dana darurat tersebut, terdakwa EP membuka rekening baru di ANZ untuk memfasilitasi suaminya agar mengambil uang di Australia untuk membeli barang-barang tersebut.

JPU mendakwa bahwa kedua orang terdakwa sering kali melakukan pertemuan mengenai persiapan proses pengawasan pembelian kamar tidur tersebut termasuk menentukan penunjukan langsung (single source). Perbuatan kedua orang terdakwa memunculkan kerugian bagi Negara sebesar US\$280.000.

JPU mendakwa kedua orang terdakwa melanggar pasal 274 KUHP mengenai dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar dan melanggar pasal 299 (1) dan (2) mengenai keterlibatan ekonomi dalam usaha.

Sidang – pemeriksaan alat bukti

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275
Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Selama dalam proses persidangan, terdakwa EP dan MH menggunakan hak diam. Saksi MS sebagai Direktur Logistik, Kementerian Kesehatan (KK) menerangkan bahwa pada tahun 2012 ia menerima kamar tidur lebih 80 buah/unit dalam kondisi baik dan saksi sendiri yang menyerahkannya ke Rumah Sakit Guido Valadares (GV) pada bulan April 2013. Sementara mengenai proses tender, saksi tidak menerangkan bahwa ia tika memiliki pengetahuan mengenai proses tersebut.

Saksi NM sebagai mantan Menteri Kesehatan menerangkan bahwa rencana pembelian kamar listrik benar sesuai dengan program Kementerian Kesehatan sejak awal untuk memodernisasi Rumah Sakit GV. Dalam anggaran Negara 2010, Kementerian Kesehatan telah mengusulkannya namun tidak disetujui oleh team penilai anggaran Negara melalui keuangan tahunan. Oleh karena itu, saksi memiliki pengetahuan terhadap permohonan dana darurat dari terdakwa MH kepada Perdana Menteri Xanana.

Saksi menambahkan bahwa ketika terdakwa MH mengajukan permohonan tersebut, saksi sedang berada di luar negeri dan pendelegasian kewenangan diserahkan kepada terdakwa yang merupakan Wakil Menteri Kesehatan. Saksi pun sempat mengirim lagi sebuah surat permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan penjelasan/justifikasi bahwa memang ada keperluan untuk membeli kamar tidur sesuai dengan permohonan yang telah diajukan. Sementara itu mengenai permohonan lain dari terdakwa MH kepada PM Xanana yang meminta penunjukkan langsung untuk pembelian kamar tidur tersebut, saksi mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya.

Saksi OV, selaku mantan Direktur Rumah Sakit Nasional Guido Valedares meberangkan bahwa ia tidak tahu mengenai permohonan pembeluan kamar tidur karena ketika kamar tidur tersebut didistribusikan, saksi sudah menyelesaikan mandatnya. Sementara itu mengenai keterangan dari pihak Pembela (mewakili pada terdakwa) bahwa para terdakwa mengajukan permohonan terhadap kamar tidur tersebut sesuai dengan permohonan dari Rumah Sakit Nasional GV pada tahun 2012 bahwa mereka menghadapi persoalan kurangnya kamar tidur, saksi menjawab bahwa barangkali permohonan tersebut berasal dari administrator Rumah Sakit Nasional GV ketika saksi sedang bepergian ke luar negeri sehingga tidak mengetahuinya.

Saksi AdC sebagai teknik pengawasan Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa pada tahun 2012 saksi menerima permohonan dari terdakwa Menteri Kesehatan untuk mengimplementasikan alokasi dana darurat sesuai dengan aturan yang ada. Saksi menambahkan bahwa tender/penawaran proyek ini tidak melalui team khusus untuk melakukan evaluasi terhadap isi dari semua permohonan di Kementerian Kesehatan, oleh karena itu saksi tidak mengetahui mengenai siapa yang memutuskan untuk melakukan penunjukan langsung dan memiliki perusahaan yang memenangkan proyek pembelian kamar tidur tersebut.

Saksi JdS sebagai tenaga teknis pengawasan di Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa ia sendiri yang melakukan pengecekan terhadap kamar tidur yang disediakan oleh perusahaan kepada Kementerian Kesehatan dan membuat laporan ke Menteri Kesehatan bahwa kamar tidur tersebut semuanya dalam keadaan baik. Setelah pembuatan laporan

tersebut, saksi langsung mengajukan permohonan pembayaran kepada Kementerian Keuangan untuk membayar perusahaan tersebut.

Saksi AF sebagai kepala pengadaan di Kementerian Kesehatan pada tahun 2011 dan 2012 menerangkan bahwa pihaknya yang membuat permohonan penawaran tunggal (*single source*) untuk proyek pembelian kamar tidur berdasarkan surat keputusan dari terdakwa MH. Saksi mengatakan bahwa dalam surat keputusan tersebut dilampirkan juga persetujuan untuk dilakukan penunjukan langsung dari Peredana Menteri kepada perusahaan Metal Craft yang bertempat tinggal di Australia.

Saksi menambahkan bahwa untuk proyek biasa atau bukan *single source* ketika hendak dilakukan tender harus dievaluasi oleh KAMS (Dewan Pengadaan Barang & Jasa Kementerian Kesehatan- *Konsellu Aprozionamentu Ministériu Saúde*) dan ketika telah memutuskan perusahaan pemenang, maka barulah pihak pengadaan melakukan keputusan akhir. Saksi juga mengatakan bahwa dalam usulan tersebut hanya membeli kamar tidur manual bukan kamar tidur listrik.

Saksi JS sebagai kepala Departemen Keuangan Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa ia sudah lupa banyak hal dari proyek tersebut, terutama mengenai proses bagaimana pemberlakuan *single source*, namun saksi mengatakan bahwa proyek tersebut berasal dari dana darurat. Selain itu, saksi sempat melakukan inspeksi, membuat laporan ke Kementerian Keuangan untuk dilakukan pembayaran.

Saksi RdJ sebagai Administrator HNVG menerangkan bahwa pihaknya yang mengajukan proposal untuk pembelian kamar tidur karena kamar tidur kurang, banyak pasien demam, berdarah, dua orang pasien tidur di dalam satu kamar tidur. Saksi juga mengatakan bahwa kebanyakan kamar tidur tersebut sudah karat dan dilas kembali. Saksi menambahkan bahwa permohonannya termasuk pembelian kamar tidur listrik untuk memfasilitasi sakit suci darah.

Saksi menjelaskan bahwa pada beberapa tahun sebelumnya, mereka selalu mengajukan proposal untuk meminta fasilitas Rumah Sakit namun usulan tersebut tidak pernah disetujui. Oleh karena itu, ketika mendapatkan telpon dari pihak pengadaan Kementerian Kesehatan bahwa bisa disiapkan proposal untuk pembelian barang-barang tambahan, saksi langsung membuat proposal dan merekomendasikan langsung untuk dibeli kamar tersebut.

Saksi JA sebagai Direktur Keuangan di Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa ia yang menyiapkan CPV kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan pembayaran namun tidak mengetahui mengenai siapa yang memutuskan untuk dilakukan *single source*. Saksi menambahkan

bahwa selama ia menjabat sebagai Direktur Keuangan, Kementerian Kesehatan mengajukan permohonan dana darurat sebanyak dua kali dengan proyek pembelian kamar tidur.

Saksi PM sebagai sopir terdakwa MH menerangkan bahwa saksi mendapat arahan dari terdakwa MH untuk menjemput terdakwa EP di rumahnya (tidak ingat lagi tanggalnya). Sesampainya di sana, saksi menemui terdakwa EP dan suaminya. Terdakwa dan suaminya menggunakan mobil lain mengikuti saksi sampai di rumah terdakwa MH. Saksi menerangkan bahwa menunggu cukup lama untuk menunggu percakapan yang dilakukan oleh kedua orang terdakwa dan suaminya terdakwa EP. Saksi menambahkan bahwa sebelumnya (sudah tidak ingat lagi tanggalnya) terdakwa MH dan EP makan siang bersama di Restoran Nelayan. Menurut saksi selama ia menjadi sopir terdakwa MH, tidak pernah melihat terdakwa MH makan bersama dengan Menteri atau Sekretaris Negara lainnya.

Saksi GdS sebagai Asisten Pribadi Menteri Kesehatan menerangkan bahwa memang kedua orang terdakwa makan siang bersama suami terdakwa EP termasuk Direktur lain di Kementerian Kesehatan di rumah terdakwa MH. Selain itu, saksi mengatakan bahwa para terdakwa juga makan siang bersama sebanyak dua kali di Chinese Food, Bidau-Akadiruhun dan Restoran Nelayan. Namun saksi tidak mengetahui isi percakapan antara kedua terdakwa.

Saksi MdC sebagai Direktur Departemen Nasional untuk Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa ia terlibat dalam pemeriksaan kamar tidur tersebut ketika diterima dari perusahaan namun pemeriksaan tersebut hanya fokus pada kuantitas. Saksi menambahkan bahwa mereka menerima kamar tidur tersebut pada 2012 dan melakukan pemeriksaan terhadap kamar tidur dilakukan dua kali.

Saksi MRS, sebagai petugas keuangan pada Kementerian Keuangan dan saat ini sebagai Kepala Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa setelah ia menduduki jabatan sekarang baru mengetahui bahwa proses pembelian kamar tidur sebelumnya tidak benar.

Saksi LB, sebagai Direktur Nasional Administrasi, Logistik dan Pengadaan barang dan jasa Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa pada tahun 2012, Wakil Menteri Kesehatan mengajukan proposal kepada Kementerian Keuangan dan daftar pembelian kamar tidur yang disiapkan oleh bagian pengadaan dan ia sendiri yang menandatangani. Saksi menambahkan bahwa proses normal harus melalui komisi inspeksi untuk melakukan verifikasi terhadap barang-barang dan bagian pengadaan pun melakukan evaluasi dan merekomendasikannya kepada atasan untuk disetujui. Namun proyek ini menurut saksi bahwa ia tidak terlibat langsung namun ia masih ingat bahwa pada tanggal 3 Februari 2012, ia menerima dokumen justifikasi dari Kantor Wakil Menteri Kesehatan dan diarsipkan di departemennya.

Saksi FB sebagai kepala Departemen Logistik Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa pada 2011 dan 2012 saksi melanjutkan pendidikannya di Indonesia, sehingga ia tidak mengetahui proyek tersebut. Namun pada tahun 2007 sampai 2009, ketika saksi masih bekerja sebagai Kepala Logistik termasuk sebagai perawat, mengakui bahwa di Rumah Sakit Nasional GV kurang obat-obatan dan kamar tidur yang perlu diganti karena kebanyakan sudah berkarat.

Saksi JB sebagai Wakil Direktor ETDA menerangkan bahwa antara 2011 dan 2012, ia dihubungi suami terdakwa EP (pemilik Perusahaan Metal Craft yang memenangkan proyek ini) untuk membantu mencari teknik yang dapat memasang kamar tidur. Saksi kemudian sempat mendapatkan 4 orang teknisi. Setelah saksi pergi ke Bandara menjemput satu orang teknik dari Australia yang bekerja sebagai Pelatih untuk melatih bagaimana memasang kamar listrik tersebut.

Saksi terus menerangkan bahwa teknik dari Australia sempat memberikan pelatihan kepada tim teknik selama satu hari, mendampingi para teknik pada saat memasang kamar tidur tersebut di Rumah Sakit Nasional Guido Valedares selama satu hari dan hari berikutnya tim teknis yang beranggota empat orang terus memasang kamar tidur tersebut. Saksi menambahkan Direktur ETDA adalah adik perempuan EP.

Saksi MA (mantan PM) menerangkan bahwa ia tidak tahu proses pembelian kamar tidur bagi Kementerian Kesehatan namun pada tahun 2012, ia sendiri yang mengunjungi Rumah Sakit tersebut dan melihat banyak pasien yang terkena demam berdarah dan banyak pasien yang tidur di ruang pasien karena kamar tidur tidak cukup.

Atas alasan tersebut, saksi mengatakan bahwa ia mengeluarkan pernyataan politik di media untuk meminta intervensi pemerintah secara mendesak terhadap situasi tersebut.

Saksi SL sebagai mantan Menteri Kesehatan menerangkan bahwa ia tidak mengetahui proyek pembelian kamar tidur karena ketika ia memulai mandatnya pada tahun 2012, ia menerima dan menandatangani permohonan pembayaran tahap kedua untuk pembelian kamar tidur. Namun ia tidak mengetahui mengenai permohonan dana darurat dan single source karena permohonan tersebut dibuat oleh Menteri dan wakilnya terdahulu. Saksi juga menerangkan bahwa pada waktu itu permohonan untuk kamar tidur sangat diperlukan karena Rumah Sakit mengalami kekurangan kamar tidur dan kondisi kamar tidur yang ada sudah tidak layak.

Saksi XG yang saat itu sebagai Perdana Menteri menerangkan bahwa saksi yang menanda tangani permohonan dari Kementerian Keuangan untuk menggunakan dana darurat dan melakukan penunjukan langsung/single source sebesar US\$2 juta untuk pembelian kamar tidur. Saksi menambahkan bahwa uang tersebut tidak hanya digunakan untuk membeli kamar tidur namun untuk membeli beberapa item yang tertera dalam permohonan Kementerian Kesehatan.

Saksi kembali menerangkan bahwa ia menandatangani permohonan tersebut karena jelas dan sesuai dengan syarat untuk mendapatkan dana darurat, karena masalah kurangnya kamar tidur benar-benar terasa pada saat itu. Selain itu, saksi menyampaikan bahwa permohonan Kementerian Kesehatan diajukan mulai dari 2010, namun tidak terealisasi karena tidak cukup dana dan setelah 2012 kebutuhan makin meningkat karena banyak masyarakat yang menderita sakit demam berdarah di Rumah Sakit

dan kurang kamar tidur, hal ini menjadi alasan terdakwa menerima permohonan pembelian kamar tidur di Rumah Sakit.

Dalam keterangan akhir, saksi menjelaskan bahwa kedua orang terdakwa bukan melakukan penyimpangan namun kedua orang terdakwa mematuhi perintah untuk melayani kepentingan masyarakat secara umum.

Saksi AS sebagai Direktur Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2011 dan 2012 menerangkan bahwa ia tidak mengetahui proses pembelian kamar tidur tersebut karena proyek tersebut ditunjuk langsung (single source) dimana kompetensinya berada di tangan para petinggi. Saksi hanya mengetahui bahwa inisiatif untuk membeli kamar tidur tersebut berasal dari terdakwa MH.

Saksi IdRG sebagai penasehat Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa ia yang mengajukan permohonan kepada Kementerian Kesehatan untuk mengizinkan penggunaan dana darurat kepada Kementerian Kesehatan berdasarkan perintah dari MH. Namun ia tidak mengetahui mengenai proses single source dan proses lain.

Saksi LL sebagai pasien yang saat itu berobat di Rumah Sakit Nasional GV menerangkan bahwa pada tahun 2012, saat itu saksi hendak akan dioperasi namun karena tidak ada fasilitas, maka saksi harus berobat ke luar negeri.

Saksi JdC (team teknis) yang bekerja sebagai petugas mekanik di bengkel mobil menerangkan bahwa ia bukan orang teknik. Ia dihubungi oleh saksi JB untuk memasang kamar tidur listrik selama dua hari di Rumah Sakit Guido Valedares (GV) dengan harga sebesar US\$20.00. Saksi menerangkan bahwa ia baru dapat memasang kamar tidur listrik setelah mendapatkan pelatihan seorang teknis yang berasal dari Australia. Saksi menambahkan bahwa pihaknya yang biasanya memasang fasilitas, termasuk memperbaiki mobil ETDA.

Saksi CG dan HM merupakan teman dari terdakwa EP menerangkan bahwa EP tidak memiliki niat jahat terhadap Negara dan terdakwa adalah seseorang yang memiliki semangat besar untuk melayani negara.

Saksi JRH yang pada saat itu sebagai Presiden menerangkan bahwa pada tahun 2010 sampai 2012, ia mengunjungi rumah sakit referral seperti Maliana, Maubise dan Rumah Sakit Nasional GV, banyak pasien yang tidur di atas lantai. Selain itu, beberapa anggota Parlemen pun sering mengkritik pemerintah mengenai situasi tersebut, setelah 2014, ia mengunjungi kembali rumah sakit dan melihat ada perubahan dalam hal fasilitas.

Saksi JAV yang merupakan Direktur Umum Kementerian Keuangan menerangkan bahwa ia mengetahui mengenai persetujuan proyek pembelian kamar tidur dari Perdana Menteri namun ia tidak mengetahui ketika prosesnya berjalan.

Saksi RH sebagai wakil Menteri Keuangan menerangkan bahwa ia hanya tahu bahwa rumah sakit kekurangan kamar tidur pada awal ketika terdakwa MH menyampaikan masalah ini di Dewan Menteri dan mengetahui ketika permohonan meminta dana darurat tersebut disetujui oleh Perdana Menteri namun saksi tidak mengetahui kelanjutan dari proyek tersebut karena terdakwa EP tidak melibatkan saksi dalam proses keseluruhan.

Menurut saksi, terdakwa EP menghubungi langsung Direktur Umum Kementerian Keuangan dan tim teknis.

Saksi juga menyampaikan bahwa ketika memasuki tahap pembelian kamar tidur, saksi mendengar percakapan antara terdakwa EP dan Menteri Kesehatan melalui telpon yang meminta pihak Kementerian Kesehatan untuk melihat kamar tidur tersebut di Australia.

Saksi DB sebagai penanggungjawab terhadap pengawasan atas kepatuhan aturan internal Bank ANZ menerangkan bahwa rekening dari suami terdakwa EP merupakan rekening individu namun terdakwa

EP bisa mengakses rekening tersebut. Saksi menambahkan bahwa rekening tersebut bukan rekening bersama antara terdakwa dan suaminya karena rekening bersama harus diwakili oleh dua orang.

Saksi NPA sebagai ahli dari PSIC menyampaikan hasil survey mengenai harga kamar tidur listrik melalui internet. Saksi melakukan survey di banyak perusahaan yang berada di China, Malaysia, Singapore dan Australia. Menurut saksi setiap Negara memiliki harga yang bervariasi untuk kamar tidur dan hanya ahli harga pasar yang dapat menjelaskan mengapa hal itu terjadi.

Saksi JP, sebagai ahli internasional mengenai pemasaran menerangkan bahwa biasanya kamar tidur yang disediakan oleh perusahaan sesuai dengan standar internasional. Mengenai kualitas, saksi menyampaikan bahwa tergantung harga, harga mahal dengan merek yang bagus dapat dijamin kualitasnya.

Tuntutan akhir JPU

Dalam tuntutan akhir, JPU berpendapat bahwa antara 2011 dan 2012, kedua terdakwa benar melakukan konspirasi untuk mendapatkan keuntungan dari proyek pembelian kamar tidur dengan menyerahkan proyek tersebut kepada perusahaan Metal Craft. JPU menimbang kedua orang terdakwa dengan menggunakan posisi mereka, dengan sengaja melanggar Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa mengenai prosedur permintaan uang dengan karakter *single source* atau penunjukkan langsung (merujuk kepada terdakwa MH) dan kedua orang terdakwa menyerahkan proyek tersebut kepada orang yang memiliki hubungan langsung sebagai suami dari terdakwa EP (pemilik perusahaan Metal Craft. JPU menganggap terdakwa EP dan MH melanggar prinsip transparansi dan independensi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum kedua terdakwa 10 tahun penjara dan menghukum kedua terdakwa membayar ganti rugi perdata kepada Negara sebesar US\$100.000 (dibayar bersama).

Sementara itu dari pihak Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan kedua terdakwa karena Pembela berpadangan bahwa rencana awal untuk pembelian kamar tidur berasal dari Kementerian Kesehatan dan terdakwa MH sebagai wakil Menteri

menerima perintah dari Menteri untuk melakukan rencana tersebut. Menteri sendiri dalam keterangannya tidak memiliki keraguan terhadap kualitas kamar tidur tersebut, diperkuat juga oleh beberapa saksi bahwa kamar tidur tersebut berkualitas dan digunakan di rumah sakit di seluruh Timor-Leste.

Sehubungan dengan validasi proses pembelian kamar tidur, menurut Pembela, proses tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang tepat berdasarkan proses pengadaan dan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, bukan melalui Departemen Wakil Menteri Kesehatan.

Pembela beranggapan bahwa JPU tidak dapat menunjukkan bukti bahwa terdakwa MH menyalahi jabatannya untuk memberikan keuntungan ekonomi secara langsung bagi dirinya atau orang lain (terdakwa EP dan suaminya).

Selain itu, Pembela mengatakan bahwa tugas Kementerian Keuangan adalah melakukan verifikasi terhadap keuangan. Setelah verifikasi kemudian menyampaikan kepada Perdana Menteri untuk menyetujuinya. Ketika telah disetujui, Kementerian Keuangan menyampaikan kepada pihak pengadaan dan pengawasan yang memprosesnya sesuai dengan kewenangannya. Karena proyek ini melibatkan Kementerian Kesehatan, sehingga Kementerian Kesehatan yang berwenang untuk melakukan pengadaan.

Pembela memperkuat bahwa terdakwa EP tidak menyetujui pengadaan, tidak memilih kontraktor, tidak melakukan negosiasi dan tidak menandatangani kontrak karena terdakwa tidak memiliki kewenangan. Pembela menambahkan bahwa seseorang tidak dapat bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang lain dan tidak mungkin untuk mengatakan kedua terdakwa melakukan kolusi, sementara Perdana Menteri yang menyetujuinya.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa Emilia Pires terbukti melanggar pasal 299 (1) KUHP mengenai tindak pidana keterlibatan ekonomi dalam usaha dan melanggar Undang-Undang No. 10/2005 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 1/2010 mengenai Undang-Undang Pengadaan. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menggunakan kewenangannya sebagai Menteri Keuangan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Terdakwa melibatkan suaminya WM, sebagai Direktur Perusahaan MAC'S Metal Craft, sebagai perusahaan satu-satunya dalam proyek pembelian kamar tidur bagi Kementerian Kesehatan.

Terdakwa EP terbukti membuka rekening bersama (berkarakter rekening bersama) di Bank ANZ dengan suaminya dimana menjadi rekening resmi perusahaan MAC'S Metal Craft. Rekening tersebut yang menerima transfer uang dari Kementerian Kesehatan untuk proyek pembelian kamar tidur.

Bagi terdakwa MH, Pengadilan membuktikan terdakwa sebagai pelaku pembantu dalam kasus tersebut karena melanggar pasal 299 (1) KUHP mengenai tindak pidana partisipasi ekonomi dalam usaha dan Undang-undang No. 10/2005 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 1/2010 mengenai Undang-Undang Pengadaan dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli kamar tidur bagi Kementerian Kesehatan yang berkarakter *single source*_ dan tidak melalui Komisi Evaluasi Kementerian Kesehatan (KAMS).

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menghukum EP selama 7 tahun penjara dan terdakwa MH dihukum selama 4 tahun penjara dan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$100.00¹.

Pengadilan juga memutuskan untuk merubah tindakan pembatasan terhadap terdakwa EP dari penerapan bukti tentang identitas dan tempat tinggal menjadi tahanan sementara, karena mempertimbangkan terdakwa EP tidak bekerja sama dalam proses persidangan (terus tinggal di Portugal). Pengadilan juga melalui putusan formal menolak permohonan terdakwa EP yang menggunakan haknya sebagai warga Negara Portugal dengan melimpahkan prosesnya ke Pengadilan Portugal, berdasarkan undang-undang No. 15/2011 mengenai Kerja sama judicial internasional.

Sementara itu, Pengadilan memutuskan membebaskan kedua orang terdakwa dari tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar yang diatur dalam pasal 274 KUHP. Pengadilan juga menyimpulkan bahwa kedua orang terdakwa tidak menimbulkan kerugian kepada Negara sesuai dengan pasal 299 (2) KUHP. Oleh karena itu, Pengadilan membebaskan para terdakwa dari tuntutan ganti rugi sebesar US\$ 280.000 dari JPU.

-Selesai-

Catatan : Informasi ini juga dapat diakses melalui ringkasan kasus JSMP, edisi Desember 2016, di : http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2016/02/SumariuKazuTribunalDILI_Tetum6.pdf
